BE-HISZ Journal
Journal of Economics and Accounting

VOL. 1 No. 1 2024

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA LPP STASIUN TVRI ACEH TAHUN 2015-2017
Zulkifli Umar, Elviza, Hendri Mauliansyah, Syarifah Ainal Mardiyah

ANALISIS NON PERFORMING FINANCING DAN KINERJA KEUANGAN PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH PERIODE 2014 – 2016
Dea Umara Hanindita

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PERUM PEGADAIAN SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH TAHUN 2016-2018
Zulkifli Umar, Maya Agustina, Bachyul Saputra

ANALISIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KEUMALA KABUPATEN PIDIE
Fariz Refzal, Emi Suryani Nst, Fitri Yunina

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN RATING OBLIGASI SYARIAH PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2017
Elviza, Lilis Maryasih

ADPEN
ASOSIASI DOSEN DAN PRAKTISI EKONOMI NUSANTARA

ANALISIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KEUMALA KABUPATEN PIDIE

Fariz Refzal[1], Emi Suryani Nst[2], Fitri Yunina[3],
[123] Universitas Muhammadiyah Aceh

Fariz.refzal@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the Accountability Report for School Assistance Funds (BOS) at State Senior High School (SMA) 1 Keumala, Pidie Regency. The method that will be used in this research is the descriptive analysis method, which is a type of research that aims to provide a systematic, factual and accurate description of the data in the field which is focused on High School Operational Assistance (BOS) funds at SMA Negeri 1 Keumala, Pidie Regency. . The object of the research is the High School Operational Assistance (BOS) funds at SMA Negeri 1 Keumala Kab. Pidie. To obtain data and information for writing this thesis, research was carried out directly at SMA Negeri 1 Keumala Kab. Pidie whose address is Jalan Beureunuen – Tangse KM. 12, Keumala District, Pidie Regency, Aceh

The results of the research show that the planning for High School Operational Assistance (BOS) funds at SMA Negeri 1 Keumala, Pidie Regency increased in 2016, namely IDR 422,450,000 and there was a decrease in BOS funds amounting to IDR 388,640,000 in 2017. Implementation of Operational Assistance funds High School (BOS) at SMA Negeri 1 Keumala Kab. Pidie 2015 to 2017 was implemented well. The use of BOS funds has a very important (urgent) influence on student learning outcomes and improving school quality, this is reflected in increasing academic achievement scores and non-academic achievements. Supervision of the management of BOS SMA funds from 2015 to 2017 was carried out by internal and external parties and reporting included planning, implementation, monitoring and evaluation of operational assistance funds for senior high schools.

Keyword: Operational Assistance Funds (BOS), Reporting, Accountability

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Keumala Kabupaten Pidie. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan yang difokuskan dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS) di SMA Negeri 1 Keumala Kabupaten Pidie. Objek penelitiannya adalah dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS) Di SMA Negeri 1 Keumala Kab. Pidie. Untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan skripsi ini, penelitian dilakukan secara langsung pada SMA Negeri 1 Keumala Kab. Pidie yang beralamat Jalan Beureunuen – Tangse KM. 12, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS) di SMA Negeri 1 Keumala Kabupaten Pidie terjadi peningkatan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 422.450.000 dan terjadi penurunan dana BOS sebesar Rp 388.640.000 pada tahun 2017. Pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS) di SMA Negeri 1 Keumala Kab. Pidie tahun 2015 s.d 2017 dilaksanakan dengan baik. Dengan adanya pemanfaatan dana BOS menimbulkan pengaruh yang sangat penting (urgent) terhadap hasil belajar siswa dan peningkatan kualitas sekolah hal ini tercermin dari peningkatan nilai prestasi akademikdan prestasi non Akademik. Pengawasan Pengelolaan dana BOS SMA tahun 2015 sampai dengan 2017 dilaksanakan oleh pihak internal dan ekternal dan Pelaporannya meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas.

Kata Kunci: Dana Bantuan Operasional (BOS), Pelaporan, Pertanggujawaban

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Salah satu peran negara dalam hal tersebut adalah dengan memberikan atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa secara garis besar biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Biaya pendidikan inilah yang akan digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan pendidikan. Masalah pokok dalam pembiayaan pendidikan salah satunya adalah bagaimana mencukupi kebutuhan investasi, operasional dan personal sekolah serta bagaimana melindungi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu untuk memperjuangkan haknya mendapatkan pendidikan yang layak baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi hal tersebut adalah memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah-sekolah yang terdaftar. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebut dengan dana BOS Nasional atau yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut BOS, selain dana BOS Nasional terdapat juga BOSDA (DANA BOS Daerah) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah/Provinsi.

Pemerintah secara umum memberikan Dana BOS untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Adanya bantuan yang diberikan pemerintah supaya sekolah membebaskan biaya pendidikan ataupun meringankan tagihan biaya sekolah, dan juga supaya kualitas proses pembelajaran di sekolah akan menjadi semakin meningkat. Besaran Dana Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 yang diterima tiap sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa per sekolah dan satuan Dana BOS. Waktu penyaluran Dana BOS ini diberikan ke sekolah per semester. Pengelolaan Dana BOS wajib berpedoman pada petunjuk

teknis BOS yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA, sebagai teknis yang bertanggung jawab dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana BOS.

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) / Rencana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RKAPBS), disamping dana yang diperoleh dari pemerintah daerah atau sumber lain yang sah. Oleh karena keterbatasan dana BOS dari pemerintah pusat, maka biaya untuk investasi sekolah dan kesejahteraan guru harus dibiayai dari sumber lainnya, dengan prioritas utama dari sumber pemerintah daerah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program dana BOS adalah Pengelolaan Dana dan segala sumberdaya yang ada dalam program dana BOS. Pentingnya Pengelolaan Dana BOS yaitu, dengan Pengelolaan yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS dengan efektif dan efisien. Sekolah menempati posisi penting dalam penentuan penggunaan Dana BOS, karena sekolah merupakan instansi yang terkait langsung Pengelolaan Dana BOS. Kesalah pahaman oleh pengelolaan dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS. Kurang spesifiknya petunjuk yang ada dalam petunjuk teknis BOS menimbulkan penerjemahan yang berbeda-beda oleh pihak Pengelolaan Dana BOS. Hal ini menjadi permasalahan dan dapat menimbulkan dugaan penyelewengan.

Masyarakat dapat berpartisipasi dengan mengawasi pengelolaan dana BOS melalui wadah pengaduan masyarakat maupun pemberian kritik dan saran yang disediakan oleh sekolah. Idealnya, dalam pelaksanaan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS, sekolah mengumumkan hasil pembelian barang dan harga yang dilakukan oleh sekolah di papan pengumuman dan ditandatangani oleh komite sekolah. Selain itu sekolah juga menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua siswa dan sekolah pada saat penerimaan rapor.

Berdasarkan hasil survei awal bahwa permasalahan saat ini, kemendiknas mulai menggunakan mekanisme baru penyaluran dana BOS. Dana BOS tidak lagi langsung ditransfer dari bendahara negara ke rekening sekolah, tetapi ditransfer ke kas APBD selanjutnya ke rekening sekolah. Kemendiknas beralasan, mekanisme baru ini bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam penyaluran dana BOS. Dengan cara ini, diharapkan pengelolaan menjadi lebih tepat waktu, tepat jumlah, dan tak ada penyelewengan. Harus diakui, masalah utama dana BOS terletak pada lambatnya penyaluran dan pengelolaan di tingkat sekolah yang tidak transparan. Selama ini, keterlambatan transfer terjadi karena berbagai faktor, seperti keterlambatan transfer oleh pemerintah pusat dan lamanya keluar surat pengantar pencairan dana oleh tim manajer BOS daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Keumala Kabupaten Pidie**"

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dana Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bos adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaaan biaya non-operasional bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaa program wajib belajar (Solikhatun, 2016: 20). Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada sekolah negeri dan swasta untuk membantu memebuhi Biaya Operasional Non Personalia Sekolah. Sebagai wujud keterpihakan terhadap siswa miskin atas pemberian dana BOS, sekolah wajibkan untuk memberikan kompensasi membebaskan *(fee waive)* dan/atau membantu *(discount fee)* siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler. Bagi sekolah yang berada di kabupaten/kota/propinsi yang telah menerapkan pendidikan gratis sekolah tidak mewajibkan memberikan pembebasan membantu siswa. Besaran dana BOS yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya bantuan (Dirjen Pendidikan Menengah tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014: 3).

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sekolah sebagai sebuah entitas organisasi harus mampu mengelola dana BOS secara profesional untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang bermutu. Dana BOS yang diterima oleh sekolah dikelola secara mandiri melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Hal ini menuntut pengelola sekolah mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara baik dan transparan. Pengelolaan dana yang baik tidak lepas dari prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kejujuran dalam pengelolaan, dan pengendalian. Untuk dapat mencapai tujuan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam penyelenggaraan dana BOS, Kementrian Pendidikan Nasional menyusun Petunjuk Teknis Keuangan. Petunjuk ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan program bagi semua tingkatan pengelola BOS.

Pembukuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Undang-undang No.16 tahun 2000 dalam Pasal 1 ayat 26 menjelaskan tentang pengertian pembukuan : Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harta perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyerahkan laporan keuangan berupa neraca dan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun Pajak berakhir.

Kegiatan pembukuan merupakan kegiatan pencatatan mengenai pemasukan dan pengeluaran Dana Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pembukuan perlu dilakukan oleh pihak pegelolaan Dana Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) karena untuk proses pembuktian dan merangkum semua kegiatan terkait dengan

dana supaya saat pemerikaan laporan keuangan sekolah sudah tertata rapi dan dapat dipahami oleh tim pemeriksa.

Biaya Operasional Sekolah (BOS) dikuncurkan sebagai realisasi pelaksanaan program kompensasi BBM dari Pemerintah pusat dan telah disetujui DPR RI, yang sepakat mengalihkan dana subsidi BBM BOS dikucurkan untuk membantu sekolah-sekolah dalam mengelola kegiatan belajar dan mengajar, baik sekolah yang berada di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional maupun Departemen Agama. Karena itu Pemanfatan BOS harus dilakukan secara transpran dengan melibatkan Komite Sekolah dan partisipasi masyarakat. Sekolah diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dari dana yang diperoleh sekolah, untuk program BOS, pembukuan yang digunakan dapat dengan tulis tangan atau menggunakan komputer.

Pengawasan Dana Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan utama pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan (Manullang, 2013: 173).

Pengawasan dilaksanakan agar tujuan pekerjaan yang telah direncanakan dan mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang telah dihadapi dalam proses pelaksanaan. Berdasarkan kesalahan maka akan ada proses perbaikan untuk masa yang akan datang.

Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang bekerjanya suatu program yang selanjutnya digunakan untuk menentukan alternatif atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Evaluasi mengelolaan Dana Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh instusi pemeriksa (Inpektorat Jenderal/BPK/Bawasda). Apabila penerima bantuan terbukti secara sah melakukan kekeliruan, kesalahan secara sengaja dalam melaksanaka program dan pengelolaan keuangan yang merugikan keuangan negara, Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memberikan peringatan/teguran secara lisan dan tertulis kepada Kepala Sekolah dengan tembusan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi.

Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Peraturan Pemerintah no. 48 tahun 2008 pasal 79 menyatakan bahwa dana pendidikan yang diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah daerah dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pertanggung jawaban dapat dilakukan secara bulanan, semesteran atau setiap selesai suatu kegiatan. Penetapan waktu pertanggungjawaban bergantung pada peraturan yang berlaku, yang ditetapkan oleh pemerintah maupun yayasan bagi sekolah swasta.

Bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah pihak sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Dinas Pendidikan

Provinsi dan Direktorat Pembinaan SMA perlu menyusun laporan hasil pelaksanaan program kepada pihak terkait. secara umum laporan yang harus disiapkan oleh sekolah penerima Dana Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), terdiri atas: laporan per semester (laporan semester I/periode Januari-Juni dan laporan semster II/perode Juli-Desember).

Laporan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana BOS. Untuk itu laporan pertanggungjawaban harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut (Monica, 2012:15):

a. Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya.
b. Laporan penggunaan dana BOS dari penanggungjawab/pengelola dana BOS di tingkat sekolah kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota meliputi Laporan Realisasi Penggunaan Dana per Sumber Dana, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak beserta dokumen pendukung bukti pengeluaran dana BOS (kuitansi/ faktur /nota/ bon dari vendor/toko/supplier) dan sekolah juga wajib mengarsipkan untuk bahan audit.
c. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat.

Berdasarkan beberapa kajian menurut para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaporan Dana Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan suatu laporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Penelitian Sebelumnya

Penelitian dari Marco (2014) dengan judul Analisis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Yogyakarta Dalam Upaya Rancangan Bangun Sistem Informasi Berbasis Web. Dari hasil penelitian Sistem Informasi Pengelolaan dana BOS tersebut mudah dipelajari. Serta sistem dapat memberikan informasi dan membuat Pengelolaan BOS dan laporan yang dibutuhkan dalam proses pemasukan barang. Sistem informasi manajemen ini memudahkan dalam pencarian dan pengelolaan data. Kekurangan yang dimiliki oleh sistem ini adalah tampilan sistem ini masih sederhana dan Sistem ini tidak memiliki fitur backup data.

Penelitian dari Amiini (2016) dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (Bos SMA) Di SMA Negeri Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perencaan Dana BOS SMA di SMA Negeri Jumapolo tahun 2013 dan 2014 dilakukan dengan menyusun RKAS oleh tim anggaran sekolah dengan diketahui oleh Komite Sekolah, guru, Karyawan, dan orang tua siswa. Penyusunan RKAS dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RAB BOS SMA. (2) Pelaksanaan Dana BOS SMA, penyaluran Dana BOS SMA tahun 2013 dan 2014 dalam dua tahap. Pengambilan Dana BOS SMA oleh Bendahara BOS. Penggunaan Dana BOS SMA tahun 2013 dan 2014 diperuntukan membiayai kegiatan operasional sekolah non-operasiona sebagaimana di petunjuk teknis BOS SMA tahun 2013 dan 2014. Pembelanjaan barang/jasa dilaksanakan oleh

tim belanja barang dengan berdasar prinsip efektif dan efisien. Pembukuan dilakukan oleh Bendahara BOS yang meliputi pembuatan buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Sekolah tidak melakukan pengembalian Dana BOS SMA tahun 2013 dan 2014. Penyetoran pajak oleh sekolah yaitu PPN, PPh pasal 21 dan PPh pasal 22. (3) Pengawasan dan Evaluasi dilakukan secara internal oleh Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelaksanaan secara eksternal dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. (4) Pelaporan Dana BOS SMA tahun 2013 dan 2014 dilakukan setiap semester melalui LPJ BOS SMA beserta lampiran. Publikasi dilakukan dengan memasang ringkasan RKAS di papan pengumuman dan memberikan selembaran penggunaan Dana BOS SMA kepada wali siswa.

Penelitian dari Solikhatun (2016) dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Pada Smk Negeri 1 Yogyakarta). Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 1 Yogyakarta berdasarkan prinsip swakelola dan partisipatif dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 70%. Prinsip transparan dilaksanakan dengan cukup baik karena memiliki nilai kecenderungan cukup baik sebesar 78% dan sekolah telah menyebarluaskan informasi penerimaan program BOS kepada warga sekolah dengan menyampaikan informasi dalam rapat dewan guru dengan komite/orang tua siswa pada awal tahun ajaran. Prinsip akuntabel dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 96%. Prinsip demokratis dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 74%. Prinsip efektif dan efisien dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 63%. Prinsip tertib administrasi dan pelaporan dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 100% dan sekolah telah melakukan pelaporan baik laporan keseluruhan maupun laporan ringkas. Prinsip saling percaya dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 89%.

Kerangka Pemikiran

Salah satu masalah pokok dalam pembiayaan pendidikan adalah bagaimana mencukupi kebutuhan investasi, operasional dan personal sekolah serta bagaimana melindungi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu untuk memperjuangkan haknya mendapatkan pendidikan yang layak Upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi hal tersebut adalah memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolahsekolah yang terdaftar. Berdasarkan latar belakang penelitian ini, terkait dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bahwa terdapat aturan atau ketetapan yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gamber berikut ini:

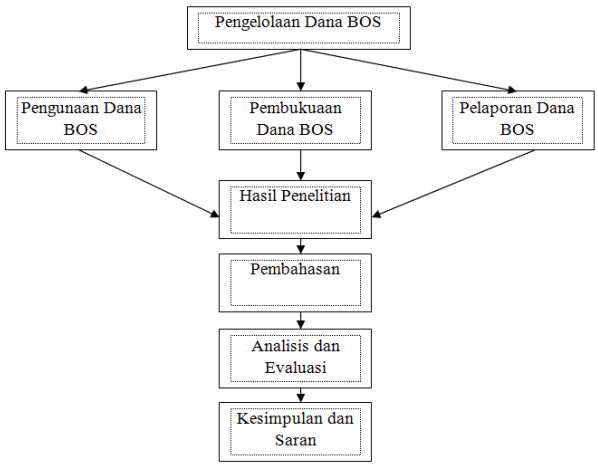

Gambar 2.1 :
Kerangka Pemikiran

3. METODE PENELITIAN

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada SMA Negeri 1 Keumala dengan alamat Jalan Beureunuen – Tangse KM. 12, Kec. Keumala, Kabupaten Pidie, Aceh. Objek penelitian ini adalah data yang terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi serta pelaporan.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013:206) yang dimaksud dengan analisis data adalah sebagai berikut: "Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menstabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan." Dalam pelaksanaan analisis data kualitatif bertujuan pada penggalian makna, penggambaran, penjelasan, dan penempatan data pada konteksnya masing-masing. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Keumala Kabupaten Pidie

Dalam penelitian ini, kegiatan menganalisis data dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus menerus sampai pada penulisan hasil penelitian. Untuk melakukan analisis data kualitatif, Menurut Sugiyono (2013: 341) ada beberapa umum yang dapat dilakukan yaitu :

a. *Display*/Penyajian Data
   Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mengamati adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mengamati terhadap peyajian data, penelitian akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat peneliti dari penyajian tersebut. Hal ini Miles dan Huberman dalam

Sugiyono (2013: 341) mengungkapkan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Tahap penyajian data yang telah dipilih-pilih diorganisasikan dalam kategori tertentu dalam bentuk matriks (*display* data) agar memperoleh gambaran secara utuh. Data mentah tentang pengelolaan dana BOS yang telah direduksi dan disusun, kemudian disajikan dalam bentuk naratif. Data yang telah disajikan merupakan data berasal dari Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Komite Sekolah, dan Guru. Selain data dari wawancara, data yang disajikan juga berasal dari data dokumentasi.

b. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi
Sejak awal peneliti memperoleh data dari lapangan, peneliti melakukan analisis dari mencari makna dari data tersebut dan segera mengambil kesimpulan. Kesimpulan tersebut pada awalnya masih sangat kabur dan diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan tersebut akan lebih jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi di lakukan dengan singkat dengan mencari data baru, dapat pula lebih mendalam bila penelitian dilakukan oleh suatu tim untuk mencapai persetujuan bersama agar lebih menjamin validitas.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Perencanaan Dana BOS

RKAS disusun untuk merencanakan kerja tahunan sekolah dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah selama satu tahun. Penyusunan RKAS didasarkan atas kebutuhan dari masing-masing sumber daya manusia untuk jangka waktu pendek, menengah, hingga panjang. Kegiatan yang paling diprioritaskan untuk dianggarkan dalam RKAS adalah kegiatan yang paling dibutuhkan dengan segera.

Kegiatan penyusunan RKAS diawali dengan mengumpulkan semua guru dan karyawan untuk melakukan pendataan kebutuhan/kegiatan dari masing-masing bidang. Kegiatan/kebutuhan tersebut akan dikumpulkan kepada Tim anggaran sekolah yang terdiri dari Wakil Kepala Sekolah staf Kurikulum, staf siswa, staf Sarana dan Prasarana, staf Humas, serta Ketua Tata Usaha. Hasil dari kegiatan yang akan dibuat rencana anggaran, dikomunikasikan kepada Komite Sekolah selaku wakil dari orang tua siswa dengan meminta pertimbangan mengenai apa saja yang perlu dilaksanakan dengan segera. Setelah ada kesepakatan dengan Komite Sekolah, dilakukan penjelasan ke guru dan karyawan mengenai kebutuhan/kegiatan yang akan disusun dalam rencana anggaran yang kemudian dijadikan sebagai draft RKAS. Pelaksanaan rapat dihadiri oleh guru, karyawan, dan komite sekolah. Kegiatan rapat akan dilakukan sosialisasi draft RKAS yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, kepada orang tua siswa, supaya orang tua siswa dapat mengetahui rencana kegiatan yang telah dibuat oleh sekolah dalam tahun tersebut dan total anggaran dana yang dibutuhkan oleh sekolah.

RKAS yang telah disetujui untuk dianggarkan pada awal tahun terkadang mengalami ketidaksesuaian saat dijalankan, sehingga sekolah harus mengadakan penyusunan RKAS perubahan. Sekolah menyusun RKAS perubahan pada saat

tengah periode anggaran. Pembuatan RKAS pembuatan ini, dilakukan untuk mengubah nominal anggaran dari kegiatan yang telah direncanakan oleh sekolah pada awal tahun, menjadi nominal yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Perubahan RKAS juga dilakukan karena terdapat kegiatan awal yang telah direncanakan tetapi tidak dapat terealisasi pada tahun berjalan anggaran tersebut, sehingga sekolah akan menggantikan dengan kegiatan lain dan disusun dalam draft RKAS perubahan.

4.7. Proses Penyaluran dan Pengambilan Dana BOS

Pengambilan Dana BOS SMA memiliki prosedur tersendiri. Sekolah wajib menunjukan dokumen-dokumen yang dibutuhkan kepada pihak bank penyalur. Pengambilan dana dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah atau Bendahara BOS SMA. Pengambilan Dana BOS SMA dilakukan dengan memberikan bukti giro yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara BOS. Pengambilan Dana BOS SMA pada bank penyalur akan diambil keseluruhan dan dilakukan pemindahan dana ke rekening sekolah.

Secara nyata prosedur penyaluran dana BOS untuk Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Keumala Kabupaten Pidie diperoleh setlah pihak Dinas Pendidikan Provinsi Aceh menerima dana BOS dari Kementerian Pendidikan Nasional selanjutnya menyalurkan dana tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie dan selanjutnya disalurkan ke rekenin Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Keumala Kabupaten Pidie. Sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis pengelolaan dana Bos tahun 2012 Nomor 53 tahun 2011 menerangkan penyaluran dana BOS dilakukan sebanya 4 (empat) triwulan dalam setahun mata anggaran yaitu:

1. Triwulan pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Maret) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Januari
2. Triwulan kedua (bulan April sampai dengan bulan Juni) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan.
3. Triwulan ketiga (bulan Juli sampai dengan bulan September) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli.
4. Triwulan keempat (bulan oktober sampai dengan bulan Desember) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Oktober.

4.7. Proses Penggunaan, Pembelanjaan, dan Pembukuan terkait Dana BOS

Petunjuk teknis BOS SMA tahun 2015 sampai dengan 2017 telah menjelaskan secara rinci mengenai penggunaan Dana BOS SMA, dan juga terdapat penjelasan daftar larangan penggunaan Dana BOS SMA. Rincian yang telah dibuat dalam petunjuk teknis ini, bertujuan agar penggunaan Dana BOS SMA semakin minim kesalahan. Penggunaan dana BOS SMA tidak diperuntukan untuk membiayai honor guru atau warga sekolah, kecuali untuk diberikan kepada tenaga ahli dibidangnya yang berasal dari luar sekolah.

Penggunaan dana BOS SMA telah disesuaikan dengan hasil rapat yang sudah disusun dalam rencana anggaran belanja. Perencanaan yang kurang lengkap ataupun terdapat kesalahan, maka sekolah berkah untuk membuat perencanaan anggaran perubahan yang kemudian dikonfirmasikan kepada Pemerintah Pusat. Pelaksanaan

penggunaan dana secara riil yang dilakukan oleh sekolah yaitu secara bersama dengan dana yang berasal dari komite/masyarakat, namun untuk dana BOS SMA hanya dikhususkan membiayai kegiatan operasional sekolah non-personalia.

Jumlah dana BOS SMA yang diterima oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Keumala Kabupaten Pidie termasuk dana yang cukup besar, namun apabila dibandingkan dengan penggunaan sekolah untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sekolah dana tersebut masih dalam kategori cukup. Sekolah masih membutuhkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kualitas. Sekolah membutuhkan dana yang berasal dari wali siswa berupa SPP untuk memnuhi kegiatan operasional sekolah selain yang dapat didanai dengan Dana BOS SMA. SPP dibayarkan oleh wali siswa setiap bulannya, terdapat perbedaan jumlah dana antara siswa yang satu dengan yang lain. Penyebab perbedaan ini dikarenakan penerapan subsidi silang dan adanya bantuan dari dana BOS SMA, sehingga ada siswa yang dibebaskan dan mendapatkan keringan membayar SPP sebagaimana kriteria yang telah dijelaskan pada LPJ BOS SMA.

Pelaksanaan kegiatan pembelian barang/jasa yang dibiayai dengan dana BOS SMA terdapat prosedur dan pertimbangan tersendiri. Pelaksanaan tersebut tidak diatur dalam petunjuk teknis BOS SMA. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Keumala Kabupaten Pidie membentu tim khusus untuk menangani pembelanjaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh sekolah. Tim belanja tersebut yang akan bertugas untuk membeli barang/jasa yang dibutuhkan sekolah, bagaimana disesuaikan dengan rencana anggaran belanja BOS SMA yang telah dibuat serta adanya sepengetahuan dari bendahara BOS dan Kepala Sekolah.

4.4. Proses Pengembalian Dana dan Perpajakan terkait Dana BOS

Pengelolaan BOS SMA juga harus melaksanakan ketetuan perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia. Ketentuan perpajakan yang perlu dilaksanakan oleh sekolah sebagai penerima BOS SMA disesuaikan dengan buku petunjuk teknis BOS SMA tahun 2015 sampai dengan 2017, seperti yang telah dipaparkan pada BAB II di Kajian Teori.

Analisis hasil terhadap Pengelolaan dana BOS SMA di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Keumala Kabupaten Pidie aspek perpajakan, sekolah telah melaksanakan ketentuan perpajakan. Pelaksanaan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan pada petunjuk teknis BOS SMA. Pajak disetorkan oleh sekolah melalui kantor pos/bank dengan menggunakan blanko Surat Setoran Pajak (SPP). Bukti penyetoran dari bank/kantor pos dan SPP akan dilampirkan pada LPJ BOS SMA. Lampiran buku pembantu pajak dan pembukuan kas umum pada LPJ BOS SMA di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Keumala Kabupaten Pidie sudah merinci semua pembayaran pajak yang telah dilaksanakan oleh sekolah. Sekolah telah melaksanakan ketentuan perpajakan sebagaimana yang telah dijelaskan di petunjuk teknis BOS SMA tahun 2015 sampai dengan 2017 untuk pengelolaan dana BOS SMA tahap pertama dan kedua. Pajak yang disetorkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Keumala Kabupaten Pidie yaitu berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh pasal 21 dan pasal 22).

4.7. Pengawasan Dana BOS

RKAS disusun untuk merencanakan kerja tahunan sekolah dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah selama satu tahun. Penyusunan RKAS didasarkan atas kebutuhan dari masing-masing sumber daya manusia untuk jangka waktu pendek, menengah, hingga panjang. Kegiatan yang paling diprioritaskan untuk dianggarkan dalam RKAS adalah kegiatan yang paling dibutuhkan dengan segera. Pengawasan Dana BOS

Pengawasan dana BOS SMA dilakukan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan tranparansi program BOS SMA. Analisis hasil terhadap komponen pengawasan pengelolaan BOS SMA tahun 2015 sampai dengan 2017 di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Keumala Kabupaten Pidie dilakukan dari pihak interal sekolah dan pihak ekternal sekolah. Pihak internal sekolah yang melakukan pengawasan adalah Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten melalui pengawas sekolah. Pihak ekternal sekolah yang melakukan pengawasan adalah Dinas Pendidikan Provinsi dan Pusat (Direktorat Pendidikan Menengah).

Komite sekolah melakukan pengawasan terhadap dana BOS SMA, untuk memantau apakah Pelaksanaan Dana BOS SMA telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun pada saat rapat pleno. Kegiatan Pengawasan Dana BOS SMA juga dilakukan untuk memantau ketepatan Pengelolaan dana BOS SMA dengan petunjuk teknis BOS SMA tahun 2015 sampai dengan 2017. Pengawasan yang dilakukan dari pihak ekstern yaitu pengawasan oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi. Pelaksanaannya melalui pengiriman instrumen kepada sekolah untuk diisi oleh pihak sekolah termasuk siswa. Intrumen tersebut diberikan untuk memantau sekolah mengenai Pengelolaan dana BOS SMA yang dilaksanakan pihak sekolah mengenai ketepatan Pelaksanaan Dana BOS SMA dengan Perencanaan Dana BOS SMA yang telah dibuat. Selain itu, adanya pelaksanaan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Pelaksanaan pengawasan tidak terdapat waktu khusus yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi, hanya sewaktu-waktu sekolah akan mendapatkan informasi akan dilaksanakan dari dinas terkait.

4.7. Pelaporan Dana BOS SMA

RKAS disusun untuk merencanakan kerja tahunan sekolah dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah selama satu tahun. Penyusunan RKAS didasarkan atas kebutuhan dari masing-masing sumber daya manusia untuk jangka waktu pendek, menengah, hingga panjang. Kegiatan yang paling diprioritaskan untuk dianggarkan dalam RKAS adalah kegiatan yang paling dibutuhkan dengan segera.

Pelaporan yang dilakukan oleh sekolah kepada Dinas Pendidikan Provinsi dilengkapi dengan laporan lengkap Pengelolaan dana BOS SMA. laporan lengkap BOS SMA terdiri dari narasi laporan terkait jumlah siswa, jumlah dana yang diterima, mekanisme seleksi pembebasan/peringan dana pendidikan, penggunaan dana, pembukuan yang terdiri dari buku kas umum, register penutupan kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak, bukti transaksi, dan SSP (Surat Setoran

Pajak) terhadap penggunaan dana selama kegiatan, serta foto dokumentasi kegiatan sekolah dengan penggunaan dana.

Selain kepada Dinas terkait, sekolah juga dituntut untuk melaporkan Pengelolaan dana BOS SMA kepada warga sekolah. Pelaporan kepada warga sekolah dilakukan pada saat rapat pleno, sekolah menginformasikan penggunaan dana BOS SMA kepada guru, komite sekolah, dan wali siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Keumala Kabupaten Pidie. Pelaporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban sekolah atas terlaksananya Dana BOS SMA kepada Pemerintah Pusat yang dibuat oleh Tim Manajemen BOS SMA di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Keumala Kabupaten Pidie.

4.7. Publikasi Dana BOS

Analisis hasil komponen Pelaporan Dana BOS SMA aspek publikasi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Keumala Kabupaten Pidie melakukan publikasi terhadap rencana dan penggunaan Dana BOS SMA kepada seluruh warga sekolah. Sekolah memasang rencana yang tertuang dalam RKAS ringkas di papan pengumuman sekolah yang telah disetujui oleh Kepala Sekolah. Publikasi terkait penggunaan Dana BOS SMA, sekolah melakukan publikasi pada saat diadakan rapat pleno antara Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah, dan Wali siswa. Sekolah memberikan lembar kertas yang dibagi untuk peserta rapat mengenai komponen penggunaan dana BOS SMA yang dilakukan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Keumala Kabupaten Pidie dan juga melakukan sosialisasi mengenai rencana anggaran untuk periode yang akan datang.

Analisis

Analisis hasil penelitian terhadap komponen pelaksanaan, untuk penyaluran Dana BOS SMA dilakukan setiap semester sehingga satu tahun dua kali penerimaan. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Keumala Kabupaten Pidie melakukan penerimaan dana pada setiap semesternya. Saat dana BOS SMA telah siap untuk diambil di Bank Penyalur, sekolah menerima Dana BOS SMA akan diberi surat pemberitahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Analisis hasil terhadap pembukuan yang dibuat oleh sekolah dalam melaksanakan pengelolaan dana BOS SMA adalah buku kas umum, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak. Pelaksanaan pembukuan dibuat oleh Bendahara setiap transaksi, setelah itu pembukuan tersebut akan dilakukan pembaruan olen Bendahara BOS terkait transaksi-transaksi yang dibiayai menggunakan dana BOS SMA. Pelaksanaan rekap data yang dilakukan oleh Bendahara BOS dilakukan setiap bulan, sehingga menyebabkan keterlambatan saat melakukan penyerahan Pelaporan LPJ BOS SMA. Setiap terjadi transaksi tim belanja wajib meminta bukti transaksi kepada pihak penjual untuk diberikan bukti kepada Bendahara BOS yang nama akan dijadikan sebagai kelengkapan dalam pelaksanaan pembukuan. Pembukuan dan bukti transaksi tersebut, akan dijadikan sebagai lampiran untuk melengkapi LPJ BOS SMA.

Analisis hasil komponen pelaksanaan dan BOS SMA aspek pengembalian dana tidak ada, karena Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Keumala Kabupaten Pidie tidak ada kelebihaan dana BOS SMA jadi tidak ada dana yang dikembalikan ke Pemerintak

Pusat. Analisis hasil terhadap Pengelolaan dana BOS SMA di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Keumala Kabupaten Pidie aspek perpajakan, sekolah telah melaksanakan ketentuan perpajakan. Pelaksanaan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan pada petunjuk teknis BOS SMA. Pajak disetorkan oleh sekolah melalui kantor pos/bank dengan menggunakan blanko Surat Setoran Pajak (SPP). Bukti penyetoran dari bank/kantor pos dan SPP akan dilampirkan pada LPJ BOS SMA.

Analisis hasil komponen Pelaporan BOS SMA di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Keumala Kabupaten Pidie, sekolah telah membuat laporan sesuai dengan petunjuk teknis BOS SMA. Sekolah melakukan Pelaporan pertanggungjawaban kepada dinas terkait, yaitu Direktorat Pembinaan SMA (pusat), Dinas Pendidikan Kabupaten yang berupa laporan ringkas dan dengan dikirim *email*. Laporan ringkas tersebut juga dikirimkan tembusan untuk Dinas Pendidikan Provinsi.

Evaluasi

Proses pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan dana BOS pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Keumala Kabupaten Pidie mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh peraturan pemerintah baik itu petunjuk teknis kegiatan maupun ketentuan lainnya dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari keuangan negara, sehingga dalam penggunaan dana yang bersumber dari pada keuangan negara tersebut tidak menimbulkan kerugian pada negara dan perkeonomian negara yang dapat mengarah kepada terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi.

Pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan dana BOS tersebut pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Keumala Kabupaten Pidie yang dilaksanakan Oleh pihak Kepala Sekolah dan Bendahara sebagai pengguna (user) tidak serta merta menggunakan untuk keperluan pribadi atau golongan saja tapi melibatkan seluruh komponen sekolah baik Dewan Guru dan Komite Sekolah dalam pelaporan pertanggung jawaban kegiatan dana BOS sehingga terjadinya keterbukaan (transparance) penggunaan dana BOS.

Dimana bendahara sekolah telah melakukan pencatatan, pembukuan dan penertiban administrasi keuangan yang masuk dan keluar secara tertib dan rapi dalam buku kas sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik itu petunjuk teknis dan peraturan pengadaan barang dan jasa serta keuangan negara, menunjukkan kegiatan tersebut dikelola secara arif dan bijaksana serta terhindar dari adanya kegiatan yang dapat mengarah kepada perbuatan tindak pidana korupsi.

Komponen kegiatan evaluasi dana BOS SMA di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Keumala Kabupaten Pidie dilakukan oleh Dinas Pendidika Provinsi. Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Provinsi yaitu terkait dengan LPJ pengelolaan dana BOS SMA yang dikumpulkan oleh pihak sekolah. Hasil pengecekan dari Dinas Provinsi apabila ada kesalahan sekolah diminta untuk melakukan perubahan. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bendahara BOS diketahui pada pengelolaan dana BOS SMA tahun 2015 sampai dengan 2017 ada evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terkait pembukuan pengelolaan dana BOS SMA yang mengalami kesalahan pencatatan kelebihan dana pada tahun 2013 periode kedua. Hasil evaluasi dari Komite Sekolah yaitu pengelolaan dana BOS SMA sudah cukup baik dan transparan, warga sekolah dan masyarakat mengetahui pengelolaan dana yang dilakukan sekolah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS) diawali dengan mengumpulkan semua guru dan karyawan untuk melakukan pendataan kebutuhan/kegiatan dari masing-masing bidang.
2. Pengambilan Dana BOS SMA dilakukan dengan memberikan bukti giro yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara BOS
3. Prosedur penyaluran dana BOS untuk Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Keumala Kabupaten Pidie diperoleh setlah pihak Dinas Pendidikan Provinsi Aceh menerima dana BOS dari Kementerian Pendidikan Nasional selanjutnya menyalurkan dana tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie dan selanjutnya disalurkan ke rekenin Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Keumala Kabupaten Pidie
4. Penggunaan dana BOS SMA tidak diperuntukan untuk membiayai honor guru atau warga sekolah, kecuali untuk diberikan kepada tenaga ahli dibidangnya yang berasal dari luar sekolah.
5. Pengembalian dana BOS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan pada petunjuk teknis BOS SMA.
6. Pengawasan dana BOS SMA dilakukan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan tranparansi program BOS SMA.
7. Pelaporan dana BOS meliputi Perencanaan Dana BOS SMA, Pelaksanaan Dana BOS SMA, Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS SMA, dan Pelaporan Dana BOS SMA.
8. Analisis hasil komponen Pelaporan Dana BOS SMA melakukan publikasi terhadap rencana dan penggunaan Dana BOS SMA kepada seluruh warga sekolah.

Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pelaporan penggunaan Dana BOS SMA, Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan guru-guru sebaiknya berkordinasi dengan baik, supaya pembuatan laporan pengelolaan dana BOS SMA dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.
2. Komite Sekolah melakukan pemantauan tidak hanya pada saat rapat pleno, namun sebaiknya juga melakukan pengecekan pembukuan dan kelengkapan bukti transaksi yang di buat oleh sekolah.
3. Pemerintah lebih meningkatan pengawasan pengelolaan dana BOS SMA agar pelaksanakan pengelolaan dana BOS SMA dapat berkualitas.
4. Sekolah Menengah Atas (BOS) di SMA Negeri 1 Keumala Kab. Pidie dapat membuat pelaporan keuangan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Amiini, N.S (2016) **Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (Bos Sma) Di Sma Negeri Jumapolo Kabupaten Karanganyar**

Tahun 2013-2014. Skripsi Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014

Manulang (2013). **Administrasi Bisnis**. Jakarta: PT. Indeks

Marco, Robert (2014) **Analisis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Dasar Di Yogyakarta Dalam Upaya Rancangan Bangun Sistem Informasi Berbasis Web.** Jurnal STMIK AMIKOM Yogyakarta

Moleong, Lexy J. (2013). **Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi**. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Monica, Jayatri (2012) **Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Smpn 11 Yogyakarta Dan Smpn 1 Purworejo**. Skripsi Fakultas Ekonomi Program Studi Ekstensi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang **Pendidikan Menengah Universal**.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 **tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).**

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang **Pendanaan Pendidikan.**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang **Pendanaan Pendidikan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar**: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Petunjuk Teknis 2015 **Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK.**

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS SMA) Sekolah Menengah Atas. (2013). Direktorat Pembinaan SMA: Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS SMA) Sekolah Menengah Atas. (2014). Direktorat Pembinaan SMA: Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014. (2013). Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Solikhatun, Ismi (2016) **Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) (Studi Pada SMK Negeri 1 Yogyakarta**). Skripsi Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

Sugiyono. (2013). **Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif**, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Susila dan Suyanto. (2015). **Metodologi Penelitian Cross Sectional**, Edisi ke-1, Klaten : Bossscript.

Sutopo, Ariesto (2014). **Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO.** Jakarta : Prenada Media Group.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 **tentang Sistem Pendidikan Nasional**.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Tahun Anggaran 2011 Analisis pengelolaan**